



PROV. SUMBAR

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam mencapai sasaran dan target indikator kinerja 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN Provinsi Sumatera Barat tahun depan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021. Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang.

Padang, 29 September 2021
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat



Drs. KHASRIL

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keadaan Geografis

b. Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi di perairan Indonesia. Narkoba masuk ke provinsi Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat perbatasan-perbatasan. Di provinsi Sumatera Barat narkoba masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai (Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Kambang dan Kepulauan Mentawai).

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 10 orang, Polri 10 orang, PPNN 28 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap Capaian Kinerja BNN Kota Sawahlunto pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	28,2	402,9
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	11	16	145
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1	1	100
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	30	33	110
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	10	10	100
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	4	8	200
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	160	146	91
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor	1	3	300

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
narkotika dan prekursor narkotika	narkotika yang berhasil dipetakan			
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	20	31	155
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0		
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	0		
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	89,79	102

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2021. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 kab/kota	Rp. 590.396.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 kab/kota	Rp. 258.035.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Kab/kota	Rp. 1.031.569.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	2 kawasan	Rp. 163.979.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,52	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 orang	Rp. 219.405.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Komponen Masyarakat	layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	8 unit	Rp. 523.112.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,2	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 peta jaringan	Rp. 200.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 berkas	Rp. 1.182.061.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp. 302.435.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	92	Rp. 137.460.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	94	Rp. 3.927.022.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Sumatera Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	1 lembaga
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	4 lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 kelompok masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 orang
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25 orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	6 lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	4 kelompok masyarakat
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	4 laporan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	9 perkara

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	20 orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 layanan
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 laporan
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan
			Layanan Perkantoran	1 layanan